

Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Masrullah^{1✉} Nur Tang² Ismail Badollahi³ Ismawati⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui Kinerja BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa pada Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait informan dan penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BUMDes Laccori, Bendahara BUMDes Laccori, dan perwakilan tokoh masyarakat di Desa Laccori. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kinerja BUMDes Laccori dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) pada desa Laccori belum memadai dilihat dari sistem pengelolaan dan proses pelaksanaan program BUMDes Laccori yang belum memenuhi beberapa prinsip pengelolaan BUMDes diantaranya prinsip Transparansi dan sosialisasi serta prinsip profesionalisme yang dimiliki oleh pengurus BUMDes masih sangat kurang.

Kata Kunci: BUMDs, Kinerja, Pendapatan Asli Desa.

Abstract

This study aims to determine the performance of BUMDes on the increase in Village Original Income in Laccori Village, Kecamatan Dua Boccoe, Bone Regency. This type of research is to use a qualitative approach which is a case study type. Sources of data used in this study are primary data sources and secondary data. Primary data sources were obtained through interviews and secondary data sources were obtained from documents related to informants and this research was the Village Head, the Head of Laccori BUMDes, the Laccori BUMDes Treasurer, and representatives of community leaders in Laccori Village. The results of this study are that the performance of BUMDes Laccori in increasing Village Original Income (PAD) in Laccori Village is not sufficient, seen from the management system and implementation process of the BUMDes Laccori program that has not fulfilled several BUMDes management principles including the principles of transparency and socialization and the principles of professionalism possessed by BUMDes management is still lacking.

Keywords: BUMDes, Performance, Village Original Income

Copyright (c) 2022 Masrullah

✉ Corresponding author :

Email Address : masrullah@unismuh.ac.id

PENDAHULUAN

Bantuan keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan desa. Meskipun desa telah memiliki

Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan...

pendapatan tersebut, namun tetap diperlukan juga suatu Badan yang mengurus kekayaan desa dan memperoleh sumber pendapatan sendiri demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berwujud pada pendapatan asli desa (PAD) agar desa mampu menghindari kesulitan anggaran dan tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008 dalam Jaryono dan Tohir, 2019). Melalui BUMDes diharapkan kemakmuran dan kemandirian desa dapat ditingkatkan dengan adanya Pendapatan Asli Desa (PAD).

Pendapatan Asli Desa (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan desa pada umumnya mengandalkan unsur pajak desa dan retribusi desa. Berkaitan dengan sektor retribusi, maka desa dapat menggali potensi sumber daya yang ada. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) secara efektif dan efisien perlu adanya upaya pengelolaan kinerja BUMDes dengan baik untuk mendapatkan sumber pendapatan baru.

Pendirian BUMDes di Desa Laccori merupakan salah satu perwujudan komitmen Pemerintah desa dalam rangka menggali segala potensi dan sumber daya yang ada demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa. Namun, jika komitmen pemerintah desa dalam pendirian BUMDes tanpa didukung adanya kemampuan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes secara efektif dan efisien, maka yang terjadi upaya untuk meningkatkan perekonomian desa terhadap pencapaian kontribusi Pendapatan Asli Desa (PAD) tentu akan sangat sulit dilakukan.

Pemerintahan Desa Laccori telah membentuk satu Badan Usaha Milik Desa beberapa tahun yang lalu dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berkaitan dengan ini, salah satu BUMDes yang terdapat di desa Laccori beberapa tahun belakangan ini kurang menunjukkan kinerja dan eksistensinya dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PAD). Jika BUMDes dapat dikelola dengan baik Pendapatan Asli Desa akan meningkat pula, maka Tinggi dan rendahnya pemasukan dari BUMDes tentunya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa pada Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone?

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan mengenai Kinerja BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan November sampai Desember 2020.

Pada penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah berupa pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Dan peneliti menggunakan instrumen

tambahan dalam membantu menggali dan menganalisis data seperti alat perekam, kamera, dan Buku catatan beserta pena. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan atau narasumber adalah kepala desa, Pengurus BUMDes, Aparat Desa, serta beberapa masyarakat yang bergabung di BUMDes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Program-program BUMDes Laccori

Sistem pengelolaan program-program BUMDes Laccori yang dijalankan oleh pengurus BUMDes sesuai AD/ART tetap mengedepankan sistem gotong royong dan kekeluargaan, dimana setiap program yang dijalankan selalu melalui musyawarah dan melibatkan masyarakat agar tetap dapat dijangkau masyarakat setempat serta melindungi hak-hak masyarakat desa.

Pembentukan BUMDes Laccori sudah dilaksanakan sejak tahun 2018, namun dibentuk dengan hanya mengacu pada AD/ART belum menggunakan Peraturan Desa sebagai pedoman dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes sehingga dianggap belum maksimal dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes Laccori. Dari hasil pengamatan peneliti, masyarakat yang bergabung dalam BUMDes aktif dalam melaksanakan program-program BUMDes yang dijalankan. Namun, untuk saat ini hanya program simpan pinjam yang berjalan dari beberapa program yang direncanakan seperti pengolahan pertanian dan perkebunan.

Pelaksanaan program simpan pinjam, masyarakat yang akan mengambil pinjaman harus memenuhi persyaratan untuk kepentingan dokumen dan sebagai jaminan yakni dengan menyeter photocopy KTP dan BPKB kendaraan ataupun surat Kepemilikan Tanah. Beberapa masyarakat yang telah mengambil uang pinjaman dari BUMDes menggunakannya dalam membuka usaha ataupun sebagai modal untuk membiayai segala keperluan dan kebutuhan dalam mengelola pertanian dan perkebunannya masing-masing. Kemudian dari hasil usaha ataupun hasil dari pertaniannya, masyarakat akan membayar bunga sebesar 5% dalam Rp. 1,000,000 kepada BUMDes setiap bulannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Asrianto selaku Direktur/ketua BUMDes Laccori *"Untuk saat ini, kegiatan pengelolaan program BUMDes telah berjalan khususnya pada unit Simpan Pinjam. Beberapa masyarakat telah mengambil pinjaman dengan persyaratan menyeter foto copy KTP dan BPKB kendaraan sebagai jaminan. Dan akan dikenakan bunga sebesar 5% dalam Rp. 1,000,000 pinjaman per bulannya."*

BUMDes dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan dalam penagihan bunga pinjaman karena masyarakat yang ada di Desa Laccori mayoritas bekerja dalam bidang pertanian dan perkebunan maka mereka kesulitan dalam membayar bunga perbulannya karena lebih bergantung pada hasil panennya yang tidak tiap bulan bisa di panen. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari salah satu masyarakat yang bergabung dalam BUMDes Simpan Pinjam Laccori. *"Bagi saya dengan adanya program simpan pinjam BUMDes sangat memberi bantuan untuk mendanai segala biaya untuk membeli perlengkapan dalam bertani. Namun, saya kesulitan dalam membayar bunga tiap bulannya karena hasil panen tidak bisa diambil tiap bulannya melainkan 2 kali dalam setahun"* Hal ini menyebabkan banyaknya tunggakan dalam pembayaran bunga yang kemudian menghambat proses perputaran pengolahan keuangan BUMDes dan berpengaruh terhadap pendapatan BUMDes Laccori.

Berdasarkan teori mengenai prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yang meliputi kooperatif, partisipatif, transparan, kesetaraan, akuntabel, berkelanjutan, dan profesional bisa dikatakan bahwa pengelolaan BUMDes Laccori belum baik dan tidak memenuhi beberapa prinsip-prinsip tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dan beberapa hasil wawancara peneliti mengenai pengelolaan BUMDes peneliti dapat mengemukakan beberapa hal sebagai berikut mengenai prinsip pengelolaan BUMDes Laccori:

a. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. *"Kalau soal kerjasama antara pengelola BUMDes itu cukup baik karena setiap ada masalah kami selalu melakukan musyawarah dan tetap mengedepankan gotongroyong dalam pelaksanaan apapun karena adanya sistem kekeluargaan diantara kami"* Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUMdes yang dipaparkan diatas, dapat diuraikan bahwa semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes Laccori sudah mampu melakukan kerjasama yang cukup baik. Hal ini dapat juga dilihat dari unit usaha yang di jalankan, dimana setiap pengambilan keputusan selalu melalui musyawarah dan mengedepankan sistem gotong royong dan kekeluargaan.

b. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMdes Laccori telah berkontribusi dalam pelaksanaan BUMDes Laccori meski masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari kesukarelaan dan ketersediaan para pengurus BUMDes dalam mengelola unit usaha meskipun ada beberapa masyarakat yang belum melunasi pinjamannya.

c. Transparansi

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. *"Menurut saya BUMDes simpan pinjam ini masih kurang transparan pada pengelolaan anggarannya karena mereka belum melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan dengan baik secara sistematis dan berkala, kemudian pengurus BUMDes kurang mensosialisasikan program simpan pinjam ini ke masyarakat mengenai proses perputarannya"* Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa yang di paparkan diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam hal transparansi pengelolaan BUMDes sangat minim karena tidak adanya pembukuan dan pelaporan yang tersusun secara sistematis. Serta kurangnya sosialisasi oleh pengurus BUMDes kepada masyarakat yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman rakyat mengenai program sistem simpan pinjam ini.

d. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan dengan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama karena semua dipandang mempunyai hak dan kedudukan yang sama. *"Dalam pengelolaan BUMDes ini kami tidak pernah membedakan dalam hal apapun, setiap program yang dijalankan selalu melalui musyawarah agar tetap dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat desa serta kami tetap melindungi hak-hak masyarakat desa"*. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUMDes yang dipaparkan diatas dapat diuraikan bahwa semua komponen yang terlibat dalam BUMDes Laccori diperlakukan secara adil tanpa memandang

golongan, suku, dan agama karena BUMDes Laccori lebih melindungi hak-hak masyarakat desa.

e. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat di pertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. *“Untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes itu sendiri telah kami serahkan dana dan anggaran kepada pengurus BUMDes yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar Rp. 80.000.000 yang kemudian mereka pergunakan sebagai modal awal, namun pengelolaan tersebut tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya pengolaan data anggaran yang tersusun dengan baik”* Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Laccori dapat di katakan bahwa dalam hal Akuntabel, BUMDes Laccori belum melakukan pembukuan secara teknis sehingga tidak adanya keterbukaan mengenai admininstrasi dan pengolahan data keuangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM yang handal dalam hal pembukuan dan pengolahan data anggaran.

f. Berkelanjutan

Kegiatan Usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat desa Laccori mengenai perkembangan usaha BUMDes Laccori. *“tidak begitu efektif, Karena program simpan pinjam ini masih memberatkan masyarakat pada saat pembayaran bunga yang wajib di bayar tiap bulannya sedangkan hasil panen kami hanya bisa di ambil 2 kali dalam setahun”* Berdasarkan hasil wawancara diatas dan setelah peneliti melakukan oservasi maka dapat diuraikan bahwa Masyarakat yang awalnya berperan aktif dalam pengembangan usaha BUMDes Laccori mengalami kemunduran karena kesulitan membayar bunga pinjaman yang akhirnya perputaran anggaran pada BUMDes laccori terhambat, sehingga program BUMDes laccori mengalami kesulitan untuk berkembang dengan baik.

g. Profesional

Kegiatan usaha hendaknya dikelola seacara profesional oleh orang-orang professional sebagai pengurus. Kegiatan usaha BUMDes Laccori hanya dikelola seadanya oleh pengurus yang ada karena kurangnya SDM yang handal. Setiap pemuda/i di desa tersebut yang lulus perguruan tinggi tidak ada yang menetap di desa.

Peranan BUMDes Laccori dalam Meningkatkan Pendapata Asli Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran yang berbeda-beda pada setiap desa. Namun, tetap saja memiliki tujuan yang sama yakni untuk memperkuat dan memperbaiki perekonomian desa. Dalam hal ini BUMDes Laccori mengambil peran dengan menyediakan kredit ringan bagi warga desa dengan membuka usaha ataupun memberikan dana untuk pembiayaan pertanian dan perkebunan, hal ini dapat mendorong adanya peningkatan perekonomian dalam desa.

BUMDes Laccori telah menjadi fasilitator bagi pengusaha dan petani di desa Laccori dengan menyediakan simpan pinjam untuk meringankan pendanaan bagi para petani. Atas keberadaan BUMDes Laccori, dampaknya secara perlahan dapat dirasakan oleh warga desa Laccori namun tidak berjalan secara maksimal karena jangka waktu pembayaran bunga yang dapat memberatkan bagi para petani.

Keberadaan BUMDes dirasakan semakin penting mengingat pemerintah desa telah memberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk itu berbagai potensi yang ada didesa harus dioptimalkan pengolahannya sehingga dapat menghasilkan

kontribusi untuk desa. Peran BUMDes sebagai instrumen penguat ekonomi desa melalui peningkatan pendapatan asli desa (PAD) khususnya pada desa Laccori, dampaknya secara ekonomi untuk meningkatkan PAD belum dapat dirasakan. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang tidak maksimal seperti tidak adanya data pengelolaan anggaran sebesar Rp. 80.000.000 yang sudah diberikan oleh pemerintah desa sebagai modal awal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari bapak Yunus selaku kepala desa di desa Laccori. *"Untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes itu sendiri telah kami serahkan dana dan anggaran kepada pengurus BUMDes yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar Rp. 80.000.000 yang kemudian mereka pergunakan sebagai modal awal, namun pengelolaan tersebut tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya pengelolaan data anggaran yang tersusun dengan baik"*

Selain itu, sebenarnya anggaran sebesar Rp. 80.000.000 tersebut telah dikelola oleh pengurus BUMDes Laccori untuk modal unit usaha simpan pinjam. Namun dalam aspek pelaksanaan anggaran tersebut, tidak bisa dikelola secara maksimal oleh pengurus BUMDes karena adanya hambatan perputaran keuangan yang disebabkan oleh banyaknya warga yang tidak membayar bunga dan pinjamannya sehingga sampai saat ini banyaknya kredit macet dan perputaran anggaran tersebut tertunda, hal ini mengakibatkan kinerja BUMDes Laccori dalam meningkatkan pendapatan asli desa Laccori masih sangat minim. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BUMDes Laccori. *"Pendapatan BUMDes ini masih terbilang minim, awal terbentuknya lumayan ada 2.000.000 tapi seiring berjalannya waktu, masyarakat banyak yang menunggak dan tidak membayar bunga pinjaman sehingga tahun berikutnya tidak ada pendapatan sama sekali karena uang tidak bisa diputar kembali. Begitupun dengan kontribusinya ke desa masih sangat minim sekali hanya 20% dari pendapatan BUMDes padahal pendapatan BUMDes belum seberapa karena unit usaha hanya pinjam dana bergulir kemudian banyak masyarakat yang tidak mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya"*.

Hamabatan-hambatan dalam pengelolaan BUMDes Laccori

Dalam mencapai tujuan utama BUMDes Laccori secara keseluruhan tentunya begitu banyak masalah dan hambatan yang dihadapi dalam mengelola BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di desa Laccori berikut uraian kendala-kendala tersebut:

- a. Faktor Internal
 - 1) Kurangnya SDA yang handal

Keterbatasan akan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dalam mengelola BUMDes Laccori merupakan faktor utama dalam melaksanakan program-program BUMDes. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya beberapa program karena tenaga kerja yang ada belum mampu mengelola keuangan BUMDes dengan baik sehingga tidak adanya pembukuan keuangan secara teknis. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Kartini selaku bendahara BUMDes. *"Pengelolaan data anggaran mengenai kegiatan operasional BUMDes Laccori masih sangat kurang, jujur saja saya selaku bendahara masih sangat minim pengetahuan mengenai pembukuan keuangan jadi saya hanya mengelola seadanya saja. begitupun dengan pengelolaan anggaran, kami hanya mengelolanya semampu yang kami bisa dengan pengetahuan yang sangat minim."* Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat

disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya manusia merupakan faktor yang dapat menyebabkan terhambatnya pengembangan dan kelangsungan jalannya BUMDes Laccori kedepannya.

2) Kurangnya sarana dan prasarana

Kurangnya peralatan kerja merupakan faktor penghambat yang dialami tenaga kerja BUMDes Laccori dalam mengelola BUMDes. Seperti tidak adanya komputer, mesin print, dan tidak adanya kantor khusus yang dimiliki BUMDes melainkan masih menumpang disalah satu rumah pengurus. Jadi karyawan merasa sangat kesulitan dalam mengelola BUMDes.

b. Faktor Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pengurus dalam mengelola BUMDes adalah dari masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya unit-unit BUMDes masih kurang sehingga keberadaan BUMDes Laccori masih disepelekan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari pak Asrianto selaku ketua BUMDes Laccori. *“Kendala yang kami alami dalam pengelolaan BUMDes adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberadaan BUMDes. Masyarakat juga menyepelekan keberadaan BUMDes ini sehingga mereka berfikir bahwa uang yang diambil dari BUMDes tidak terlalu dipedulikan untuk pengembaliannya padahal uang tersebut akan diputar kembali bahkan akan digunakan untuk membuka unit usaha lainnya. Banyaknya tunggakan masyarakat mengakibatkan terhambatnya program-program BUMDes dan kelansungan perkembangan BUMDes Laccori”*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak memahami dan beranggapan bahwa BUMDes tidka begitu penting sehingga mereka menyepelekan BUMDes. Kemudian kesadaran masyarakat akan keberadaan BUMDes juga merupakan kendala utamanya, dengan tidak adanya kesadaran masyarakat tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat yang manunggak membayaran bunga bahkan pengembalian uang pinjamannya yang mengakibatkan banyaknya kredit macet dalam BUMDes Laccori sehingga perputaran keuangan terhambat dan pengembangan serta kelansungan BUMDes terkendala

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dari beberapa narasumber yang telah dipaparkan diatas maka peneliti dapat menilai bahwa kinerja BUMDes Laccori dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) pada desa Laccori belum memadai dilihat dari segi sistem pengelolaan program BUMDes, peranan BUMDes Laccori serta hambatan-hambatan yang di hadapi dalam menegelola BUMDes. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang diuraikan berikut ini.

Dalam sistem pengelolaan BUMDes Laccori yang dijalankan oleh pengurus sesuai dengan AD/ART dan tetap mengedepankan sistem gotong royong dan kekeluargaan. Namun, dalam proses pelaksanaan program BUMDes Laccori ada beberapa prinsip pengelolaan BUMDes yang tidak terpenuhi. Dalam pengelolaan program BUMDes Laccori belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dikarenakan kurangnya transparansi, Akuntabel karena tidak adanya pembukuan dan pelaporan yang tersusun secara teknis dan sistematis sehingga tidak adanya keterbukaan mengenai administrasi dan pengolahan data keuangan. Serta kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan BUMDes Laccori. Begitupula pada prinsip profesionalisme yang tidak

terpenuhi, dalam pelaksanaan program BUMDes hanya dijalankan dan dikelola seadanya oleh pengurus karena kurangnya tenaga kerja (SDM) yang handal dalam bidang tersebut sehingga tidak adanya sistem pembukuan yang baik secara teknis.

Dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) BUMDes Laccori berusaha mengambil peran dengan menyediakan kredit ringan bagi warga desa untuk membuka peluang usaha. BUMDes Laccori telah menjadi fasilitator bagi pengusaha dan petani dengan menyediakan dana untuk dipinjamkan sebagai modal awal ataupun untuk meringankan petani dalam mendanai segala keperluannya untuk mengembangkan pertaniannya. Dampaknya secara perlahan dapat dirasakan oleh warga desa Laccori namun tidak berjalan secara maksimal karena jangka waktu pembayaran bunga yang memberatkan para petani yang tidak panen setiap bulannya sedangkan bunga pinjamannya harus dibayar setiap bulan. Peran BUMDes Laccori sebagai instrumen penguat ekonomi desa melalui peningkatan pendapatan asli desa (PAD) dampaknya secara ekonomi belum dirasakan. Hal ini disebabkan pengelolaan BUMDes yang tidak maksimal dan banyaknya tunggakan kredit macet dari masyarakat yang mengambil pinjaman.

Dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan program BUMDes Laccori tidak terlepas dari kendala-kendala dan masalah yang dihadapi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam pengelolaan BUMDes Laccori masalah yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sebagai tenaga kerja dalam mengelola program BUMDes Laccori padahal SDM merupakan hal utama dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan BUMDes. Pada BUMDes Laccori sangat terbatas akan SDM sebagai tenaga kerja sehingga hal ini menyebabkan terhambatnya beberapa program dan tidak adanya pembukuan yang baik secara teknis. Para karyawan BUMDes Laccori juga kekurangan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain itu, yang menjadi faktor terhambatnya pertumbuhan BUMDes Laccori adalah masyarakat desa yang mengambil pinjaman. Masyarakat kurang memahami akan pentingnya keberadaan BUMDes ini sehingga mereka menyepelekan BUMDes Laccori dan tidak terlalu memikirkan pengembalian pinjamannya yang mengakibatkan banyaknya tunggakan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti dapat dikemukakan beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini. Kinerja BUMDes Laccori dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) pada desa Laccori belum memadai dilihat dari sistem pengelolaan dan proses pelaksanaan program BUMDes Laccori yang belum memenuhi beberapa prinsip pengelolaan BUMDes diantaranya prinsip Transparansi dan sosialisasi serta prinsip profesionalisme yang dimiliki oleh pengurus BUMDes masih sangat kurang. Sehingga peran BUMDes Laccori sebagai instrumen penguat ekonomi desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dampaknya secara ekonomi belum bisa dirasakan.

Kinerja BUMDes yang belum memadai tersebut tidak terlepas dari banyaknya hambatan dan kendala yang di hadapi dalam mengelola BUMDes Laccori seperti kurangnya SDA yang handal dalam bidang ini, dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pengelola BUMDes Laccori dalam mengelola dan menjalankan tugas dan wewenangnya. Serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat desa akan keberadaan BUMDes tersebut..

Referensi :

- Adhari, A dan Ismaidar. 2017. Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. *Jurnal Dialogia Luridica*. Vol 9, No 1
- Arianty N. 2014. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Manajemen & Bisnis*. Vol 14, No. 02
- Dewi, S.K. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal Of Rural and Development*. Vol 5, No 1
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara: Jakarta
- Gufran dan Hajairin. 2019. Pelaksanaan BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Belo Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol 6, No 1
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga: Jakarta
- Hartono, Jogianto. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE: Yogyakarta
- Indrianasari, T.N. 2017. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Volume 1, No 2
- Irwani dan Bahriannor. 2019. Pengelolaan BUMDes Hanjak Maju dalam Berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hillir Kabupaten Pulau Pisau. *Jurnal Anterior*. Vol 19, No 1
- Ismail, M. et. al. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 19, No 2
- Jaryono dan Tohir. 2019. Analisis Kinerja BUMdes “Mitra Usaha Makmur” dalam Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis*. Vol 9, No 9
- Marlina, eka. 2019. Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Ciukepa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*. Volume 5, no 1
- Prayudi, A. et. al. 2017. Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes Untuk Kemandirian Desa pada Desa di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Ilmiah*. Vol 8, No 2
- Putri N. et. al. 2016. Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 16, No.1
- Rosidin Utang. 2019. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Pustaka Setia: Bandung
- Silahuddin, M. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tempat Tinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Sembiring, Sentosa. 2017. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal*. Volume 39, no 1
- Sofyan D.K. 2013. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Kerja Pegawai BAPPEDA. *Malikussaleh Industrial Engineering Journal*. Vol.2 No.1
- Subardi A dan Mardiyanto J. 2018. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa terhadap Peningkatan Pendapatan Asli desa (PADes). *Jurnal Bedah Hukum*. Vol. 2, No 2
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Wijaksono P. et. al. 2017. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaru Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5 (4): 1637-1650
- Wowor M. et. al. 2019. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tomposo. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Volume 3, No. 3.